KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Baleg berharap fraksi konsisten
Tanggal : Selasa, 21 Maret 2017
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 5

Baleg Berharap Fraksi Konsisten

BADAN Legislasi DPR siap membahas revisi UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan penugasan Badan Musyawarah DPR dan berharap semua fraksi menaati kesepakatan awal revisi.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Baleg Firman Soebagyo saat dihubungi di Jakarta, kemarin. Dia berharap proses pembahasannya tidak berlarut-larut sehingga seharusnya semua fraksi di DPR konsisten dengan kesepakatan awal, yaitu penambahan satu kursi pemimpin DPR dan pemimpin MPR.

Firman mengingatkan pada pandangan mini fraksi tidak ada usul lain selain terkait dengan penambahan satu unsur pimpinan DPR dan MPR. "Selain itu, tentunya pemerintah sudah mengirimkan daftar inventarisasi masalah, kami akan baca dahulu," ujarnya.

Politikus Partai Golkar itu menilai kalau dalam DIM pemerintah tidak ada tambahan lain, Baleg tidak bisa membahas di luar itu sehingga kalau tetap dipaksakan, permintaan baru akan terjadi *deadlock*.

Selain itu, dia menjelaskan setelah Bamus menugasi Baleg membahas revisi UU MD3, hasilnya akan dibawa ke rapat paripurna untuk dimintai persetujuan anggota DPR. Setelah itu, Baleg akan membahas revisi UU MD3 bersama pemerintah.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan rapat konsultasi pengganti Badan Musyawarah pada Senin (20/3) menugasi Badan Legislasi untuk membahas poin revisi UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. "Jadi, misalnya MD3 kita serahkan kepada Baleg, kemudian beberapa surat-surat yang lain juga, termasuk inisiatif-inisiatof dari anggota juga," kata Fadli.

Dia menjelaskan Baleg DPR akan ditugasi untuk membahas poin revisi menyangkut penambahan satu jatah kursi pemimpin DPR untuk PDI Perjuangan. Fadli menyerahkan permintaan lain dari Fraksi PKB dan Gerindra terkait dengan penambahan satu kursi di DPR dan MPR di Baleg termasuk soal target pembahasan UU MD3 akan diserahkan menjadi domain Baleg.

"Kalau itu, sih, kita juga maunya seperti itu. Saya kira pada prinsipnya sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan (tidak meluas pembahasannya). Kalau saya katakan melebar, namanya sudah mendahului. Tapi ada kesepakatan terbatas. Nah, terbatasnya apakah sudah seperti itu apa bertambah atau berkurang, kita lihat nanti dinamikanya di Baleg," pungkasnya. (Nov/Ant/P-4)